

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara demokrasi, menjamin beberapa hak dasar bagi setiap warganya, termasuk kebebasan berserikat atau berorganisasi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berpendapat. “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,” menurut Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut.

Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Setiap orang berhak untuk berkumpul, bertemu, dan berserikat untuk maksud-maksud damai,” yang selanjutnya menekankan klausul ini. Untuk dapat terlibat dalam proses politik dan penyelenggaraan negara sesuai dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak membentuk partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi lainnya.

Salah satu cara untuk mewujudkan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah melalui organisasi kemasyarakatan (Ormas). Menurut data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, hingga awal tahun 2022, terdapat 343 Ormas yang terdaftar, di mana 144 di antaranya berbadan hukum dan 199 lainnya tidak berbadan hukum. Organisasi-organisasi ini bergerak di berbagai bidang,

termasuk sosial dan budaya, keagamaan, lingkungan dan sumber daya, profesi, ekonomi, dan perdagangan.

**Tabel 1.1 Jumlah Ormas Di Kota Semarang Tahun 2023**

| <b>Bidang</b>              | <b>Jumlah Ormas Berbadan Hukum</b> | <b>Jumlah Ormas Tidak Berbadan Hukum</b> |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Sosial Kebudayaan          | 85                                 | 89                                       |
| Keagamaan                  | 34                                 | 28                                       |
| Lingkungan dan Sumber Daya | 5                                  | 46                                       |
| Profesi                    | 18                                 | 21                                       |
| Ekonomi dan Perdagangan    | 2                                  | 15                                       |
| Total Jumlah Ormas         | 144                                | 199                                      |

***Sumber:** Kesbangpol Kota Semarang Tahun 2023*

Mayoritas OMS di Kota Semarang bergerak di bidang sosial, budaya, dan keagamaan, seperti yang digambarkan pada tabel di atas. Hal ini sejalan dengan kondisi sosial ekonomi Kota Semarang yang beragam dalam hal budaya, agama, dan kepercayaan. OMS sering melakukan program kerja atau kegiatan yang sesuai dengan fokus atau bidang utama organisasi mereka. Namun beberapa OMS juga melaksanakan tugas yang tidak terkait dengan misi utama mereka. Organisasi dengan banyak fokus biasanya terlibat dalam bidang profesional dan keagamaan.

Selama tahun 2023, setiap tahunnya tercatat adanya pengurangan jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penurunan ini diduga disebabkan oleh beberapa organisasi yang tidak memperpanjang masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawasan di Kota Semarang, Badan Kesbangpol Kota Semarang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Renstra ini digunakan untuk menentukan arah kebijakan dan alokasi sumber daya demi mencapai tujuan strategis. Penyusunan

Renstra tersebut didasarkan pada evaluasi isu dan permasalahan dari capaian kinerja selama periode 2016-2020.

Masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah minimnya pendidikan politik dan fasilitasi pendidikan politik. Lalu kurangnya pembekalan dan pendampingan kepada pengurus-pengurus Ormas untuk terlibat aktif menjalankan fungsi kemasyarakatannya. Kurangnya partisipasi Masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pembekalan dan pendampingan kepada pengurus-pengurus Ormas untuk terlibat aktif dalam menjalankan fungsi kemasyarakatannya. Berikut ini adalah rincian jumlah Ormas di Kota Semarang yang diketahui tidak aktif dalam kurun waktu 2018-2020.

**Tabel 1.2 Jumlah Ormas Di Kota Semarang yang Diketahui Tidak Aktif Tahun 2018-2020**

| Berbadan Hukum |      |      | Tidak Berbadan Hukum |      |      |
|----------------|------|------|----------------------|------|------|
| 2018           | 2019 | 2020 | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 14             | 17   | 19   | 5                    | 8    | 11   |

*Sumber: Database Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

Mempertimbangkan permasalahan dan isu yang terjadi di tahun tahun sebelumnya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang kemudian mencanangkan strategi untuk meningkatkan peran serta Ormas dalam pembangunan. Peningkatan peran Ormas dilakukan dengan cara mendorong kemandirian Ormas dan memberikan fasilitas supaya Ormas-Ormas di Kota Semarang dapat memberikan pelayanan atau kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat umum.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur pemberdayaan Ormas dalam Bab XII Pasal 40, yang pada Ayat (1)

disebutkan bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.” Selanjutnya Ayat (3) menyatakan bahwa “pemberdayaan Ormas dilakukan melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.” Proses pemberdayaan kebijakan fasilitasi yakni berupa peraturan perundang- undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.

Tidak sampai di situ, Penguatan kapasitas kelembagaan juga telah diatur dalam Ayat (5) yang mencakup:

- a. Penguatan manajemen organisasi;
- b. Penyediaan data dan informasi;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
- e. Penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
- f. Pemberian penghargaan;
- g. Penelitian dan pengembangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur pemberdayaan Ormas dalam Bab XII Pasal 40 Ayat (6) turut diatur pula terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan, atau kursus. Pemerintah daerah wajib memberdayakan Ormas berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang telah melaporkan keberadaan kepengurusannya. Pemberdayaan Ormas bagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan kepada :

- 1) Ormas yang berbadan hukum dan telah melaporkan keberadaan kepengurusannya kepada pemerintah daerah dan
- 2) Ormas tidak berbadan hukum yang telah terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, serta telah melaporkan keberadaan kepengurusannya kepada pemerintah daerah. Pemberdayaan Ormas bagaimana dimaksud dalam pasal 6, dilakukan melalui:
  - a. penguatan kapasitas kelembagaan,
  - b. peningkatan kualitas sumberdaya manusia,
  - c. kemitraan Ormas dengan perangkat daerah.

Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga memiliki fungsi strategis dalam menyusun kebijakan pemberdayaan Ormas. Fungsi tersebut diwujudkan melalui kegiatan fasilitasi, pembinaan, dan pemberdayaan untuk mendorong partisipasi Ormas dalam pembangunan nasional. Namun, implementasinya masih kurang efektif, salah satunya akibat persiapan yang tidak maksimal.

Selanjutnya proses penyusunan bahan kebijakan fasilitasi pemberdayaan, dimulai dengan merancang kebijakan yang mendukung organisasi kemasyarakatan. Untuk memastikan ketepatan sasaran dalam pelaksanaannya, langkah awal yang dilakukan adalah memilih organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang telah mengajukan proposal permohonan bantuan dana. Proposal tersebut kemudian diverifikasi dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti tingkat keaktifan Ormas dalam menjalankan kegiatan dan status pendaftaran mereka sesuai dengan peraturan Permendagri. Meski Ormas yang belum terdaftar tetap memiliki peluang untuk diberdayakan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

memprioritaskan Ormas yang sudah terdaftar. Selain itu, Ormas yang belum pernah mendapatkan pemberdayaan sebelumnya juga diberikan kesempatan untuk memastikan pemerataan bantuan.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kendala, seperti banyaknya proposal yang diajukan oleh Ormas yang belum terdaftar tetapi menginginkan program pemberdayaan. Situasi ini menuntut adanya perbaikan proses pemberdayaan, termasuk meningkatkan objektivitas dan menghindari intervensi pihak lain, sehingga anggaran yang dikeluarkan pemerintah dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan di antara organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan fasilitasi untuk pemberdayaan Ormas. Namun, pemberian bantuan dana atau alokasi anggaran dari pemerintah hingga saat ini masih belum berjalan efektif. Bantuan dana kesekretariatan yang disediakan oleh pemerintah melalui Kesbangpol sebenarnya bertujuan untuk mendukung Ormas dalam berekspresi dan berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional. Sayangnya, implementasi dari upaya ini masih menghadapi beberapa tantangan.

Pertama, dana yang direncanakan belum merata, sehingga tidak semua Ormas merasakan manfaatnya dan bantuan cenderung terfokus pada Ormas yang lebih aktif. Kedua, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Kesbangpol didominasi oleh program sosialisasi yang tidak efektif, dan tanoa adanya pengembangan program yang lebih inovatif dan bervariasi, menyebabkan beberapa Ormas tidak mengetahui cara mengakses bantuan tersebut.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian dengan judul “Analisis Peran Dalam Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang” ini dilakukan untuk menganalisis lebih dalam mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang, dengan harapan dapat memberikan bahan kajian tambahan yang dapat berguna untuk mendorong terciptanya solusi dalam upaya meningkatkan efektivitas program pemberdayaan Ormas di masa mendatang.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Kurangnya peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pendataan keberadaan organisasi kemasyarakatan
2. Kurangnya pembekalan dan pendampingan kepada pengurus-pengurus Ormas untuk terlibat aktif menjalankan fungsi kemasyarakatannya
3. Kurangnya peran dalam bantuan keuangan yang belum merata
4. Kurangnya persiapan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
5. Kurangnya pola pengembangan terhadap kegiatan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka dalam rumusan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang?
2. Apa faktor penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang terdapat di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Dilakukannya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis antara lain:

##### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Ditinjau dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap organisasi kemasyarakatan bidang sosial di Kota Semarang. Selain itu, diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan yang dapat memberikan pengetahuan baru



kepada aspek lainnya untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut, khususnya terkait dengan permasalahan ini.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi Peneliti: Konten yang ditawarkan dalam penelitian ini didasarkan pada materi yang diajarkan dalam perkuliahan dan menggabungkan pengetahuan dan pengalaman untuk melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian ini didasarkan pada hasil dari proses pembelajaran selama perkuliahan.
2. Bagi Intansi Terkait: Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi dan meningkatkan peran bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan proses pemberdayaan terhadap Ormas bidang sosial di Kota Semarang agar lebih optimal.
3. Bagi Organisasi Kemasyarakatan: Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi organisasi kemasyarakatan menangani hak untuk mendapatkan pemberdayaan dari Badan Kesatuan Bangsa

## **1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.6.1 Penelitian Terdahulu**

Selain membantu peneliti memposisikan karya mereka dan menunjukkan keunikannya, penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai pembanding dan sumber inspirasi untuk penelitian di masa depan. Para peneliti memberikan gambaran umum dan daftar temuan penelitian sebelumnya yang relevan, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, di bagian ini.

**Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu**

| No | Penulisan/Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                | Judul                                                                                                                                               | Metode dan Teori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Riska Firdaus (2020)</p> <p>Lagaligo, R. I., Luwu, K., Negara, I. A., Ilmu, F., Politik, I., &amp; Djemma, U. A. (2019). Jurnal I La Galigo   Public Administration Journal. Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Palopo (Studi Badan Lingkungan Hidup), 2(2), 61–71.</p> | <p>Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara</p> | <p><b>Metode:</b> Deskriptif<br/><b>Kuantitatif Teori:</b> Terdapat 4 teori yang digunakan untuk menentukan peran Pemerintah dalam pemberdayaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara, menggunakan teori yang dikemukakan oleh Arif (dalam Nurdin, 2014), yaitu Peran Pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara ada dalam kategori cukup baik, dimana dalam indikator regulator, mencakup peran pemerintah dalam membuat kebijakan, memfasilitasi kebutuhan kelompok tani kakao, meningkatkan produktivitas petani, mengatasi masalah petani kakao, dan meningkatkan mutu dan kualitas perkebunan kakao, dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dengan presentase rata-rata 64,99%. Peran pemerintah sebagai Dinamisator berkaitan dengan peran pemerintah sebagai penggerak, meningkatkan kapasitas pemberdayaan</p> |

| No | Penulisan/Tahun | Judul | Metode dan Teori | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |       |                  | <p>petani kakao, meningkatkan inovasi dan pemanfaat teknologi, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan perkebunan, meningkatkan konsep pemberdayaan yang partisipatif, dan sebagai agen mempercepat perubahan, dapat dikatakan baik dengan presentase rata-rata 62,83%. Peran pemerintah sebagai Fasilitator, menyediakan sarana dan prasarana, menyediakan modal, penyediaan pendidikan dan pelatihan, penyediaan penyuluhan dan pendampingan, dan peran pemerintah dalam memberikan keterampilan secara teknis, dapat dikatakan cukup baik, dengan presentase rata-rata 52,69%. Peran pemerintah sebagai Katalisator, merespon berbagai keluhan petani</p> |

| No | Penulisan/Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Judul                                                                                          | Metode dan Teori                                                                                                                                                                                                                                                                | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kakao, melakukan kordinasi, kemampuan penyuluh dan kinerja yang harus lebih ditingkatkan dan pemasaran hasil pertanian harus dipermudah agar petani kakao dapat menjual hasil pertaniannya. Peran pemerintah sebagai katalisator di Kecamatan Sabbang dikatakan cukup baik dengan jumlah presentase rata-rata 52,89%. |
| 2. | <p>Elvira Ramdayanti, Gilli Argenti, dan Prilla Marsingga (2021)</p> <p>Ramdayanti, E., Argenti, G., &amp; Marsingga, P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 6(2), 194–201.</p> | Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang | <p><b>Metode:</b> Deskriptif Kualitatif</p> <p><b>Teori:</b> Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang, penelitian ini menggunakan Teori Peran Pemerintah dengan 4 indikator yang dikemukakan oleh Arif dalam Adhiwati</p> | Hasil dari penelitian ini adalah peran pemerintah bagi para nelayan sudah bisa dikatakan baik dengan adanya program pembinaan, pelatihan, asuransi dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana kepada nelayan desa Ciparagejaya.                                                                                    |

| No | Penulisan/Tahun                                                                                                                                                                                                                                                | Judul                                                                                                                   | Metode dan Teori                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         | (2012:9) ) yaitu: peran pemerintah baik sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. | <p>Anggreyni Raintung, Sarah Sambiran, dan Ismail Sumampow (2021)</p> <p>Raintung, A. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Governance, 1, No.2(2), 1–9.</p> | Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow | <p><b>Metode:</b> Kualitatif</p> <p><b>Teori:</b> Untuk dapat melihat seberapa aktif peran pemerintah desa maka penelitian ini menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Arif dan Adhawati (2012;9) yaitu: peran pemerintah baik sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator</p> | Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di desa mobuya belum terlaksana secara optimal dikarenakan kurangnya perhatian oleh pemerintah terhadap kelompok tani, kurangnya keaktifan dan keterlibatan pemerintah secara langsung untuk melihat kendala yang dialami oleh para kelompok tani, baik secara modal, maupun sarana dan prasarana pertanian serta pembagian bantuan yang belum merata bagi kelompok tani. |
| 4. | Anisa Ramadhanti, Sri Wahyuni, Mukhamad Zulianto (2022),                                                                                                                                                                                                       | Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan umkm batik di                                                                | <p><b>Metode:</b> Deskriptif</p> <p><b>Teori :</b> Diva (2009:15), pemerintah sebagai fasilitator</p>                                                                                                                                                                                             | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah daerah menyediakan fasilitas dengan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| No | Penulisan/Tahun                                                                                                                                                                                                                                               | Judul                                                                                                             | Metode dan Teori                                                                                                                                                                                                                                            | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan umkm batik di Kabupaten banyuwangi, Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial, Volume 16 Nomor 1.                                                                    | Kabupaten banyuwangi                                                                                              | tentunya harus menyediakan fasilitas yang mendukung agar UMKM dapat menempuh target yang ingin dicapai. Fasilitas yang dimaksudkan bisa berupa pemberian pelatihan dan pemberian bantuan barang dan jasa subsidi.                                           | mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pengrajin batik, mengadakan pameran daerah maupun luar daerah, membuat event khusus batik yaitu Banyuwangi Batik Festival (BBF), menyediakan marketplace secara online seperti banyuwangi-mall.com maupun offline bagi pemilik UMKM untuk memasarkan produknya.                                |
| 5. | Windasai, Mohammad Mas'ud Said dan Hayat (2021)<br><br>Windasai, Said, M. M., & Hayat. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep). JIP (Jurnal Inovasi Penelitian), 2(3), 797. | Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep) | <b>Metode:</b> Deskriptif Kualitatif<br><b>Teori:</b> Menurut arif (Muhardi, dkk, 2014:69) Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu: baik sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator. | Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran pemerintah daerah Kabupaten Sumenep khususnya di bidang perikanan tidak sepenuhnya maksimal dalam segi pemberdayaan. hal tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yaitu yang pertama, pengembangan sumberdaya manusia, dimana dalam hal pengembangan sumberdaya manusia pemerintah melalui pemberian pelatihan dan |

| No | Penulisan/Tahun                                                                                                                                                                          | Judul                                                                                    | Metode dan Teori                                                                                                                                                           | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                            | pembinaan, untuk Kepulauan Masalembu dalam hal pemberian pelatihan dan pembinaan masih belum terealisasi. Kedua, pengembangan sarana dan prasarana dalam hal ini pemerintah melalui pemberian bantuan, dalam pemberian bantuan masyarakat terlebih dahulu mengajukan proposal. Ketiga pembentukan kelembagaan nelayan dimana kelembagaan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat nelayan dan mempermudah pemerintah dalam mengkoordiner masyarakat nelayan. |
| 6. | Hayati dan Surya (2020)<br><br>Hayati, S., & Surya, M. A. (2020). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 6(2), 16. | Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Makassar | <b>Metode:</b> Deskriptif Kualitatif <b>Teori:</b> Peran berlandaskan pada aturan dan keinginan, dalam hal ini peran mengungkapkan tindakan yang harus dilakukan seseorang | Hasil penelitian membuktikan bahwa peranan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas di kota Makassar telah berjalan cukup baik. Pemerintah sebagai regulator merumuskan acuan dasar bagi                                                                                                                                                                                                                                           |

| No | Penulisan/Tahun | Judul | Metode dan Teori                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |       | dalam kondisi tertentu supaya bisa mewujudkan harapannya pribadi maupun harapan pihak lain terkait peran tersebut. Teori yang digunakan yaitu teori Arif (dalam Nurdin et al, 2014) menguraikan beberapa peranan pemerintah diantaranya pemerintah selaku Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Motivator. | masyarakat yang merupakan instrument guna mengelola berbagai program penyelenggaraan pemberdayaan. Sebagai dinamisator, Dinas Sosial kota Makassar senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dan memberikan pengarahan serta bimbingan kepada mereka yang menyandang disabilitas. Peran pemerintah sebagai fasilitator ditunjukkan dari adanya kegiatan pendampingan, pengadaan fasilitas serta tunjangan atau bantuan sosial bagi warga penyandang disabilitas. Adapun selaku motivator, pemerintah telah melakukan penyuluhan maupun sosialisasi, dan memberikan penghargaan pada warga masyarakat. Faktor penghambat peran pemerintah |



| No | Penulisan/Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Judul                                                                                            | Metode dan Teori                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dalam memberdayakan masyarakat di antaranya inkonsistensi aturan dan sistem yang dibentuk dan pemahaman penyandang disabilitas yang rendah tentang proses dan aturan yang ada. Ada pun, faktor pendorongnya adalah perhatian keluarga, lembaga sosial, pemerhati isu sosial, serta pemerintah, dan kecanggihan teknologi.          |
| 7. | <p>Kinanti Resmi Hayati, Izzatun Nisak, Amalia Tasya Salsabila Suyanto, dan Mahesha Aginio Bimantio (2022)</p> <p>Hayati, K. R., Nisak, I., Suyanto, A. T. S., &amp; Bimantio, M. A. (2022). Peran Pemerintah Kelurahan Kebonsari Surabaya dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 4, 11–16.</p> <p><a href="https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i1.457">https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i1.457</a></p> | Peran Pemerintah Kelurahan Kebonsari Surabaya Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. | <p><b>Metode:</b> Deskriptif Kualitatif</p> <p><b>Teori:</b> Dasar teori yang digunakan yaitu dengan menggunakan teori dari Menurut Gede Diva (2009:15- 18) yang mengemukakan terdapat tiga peran pemerintah dalam pengembangan UMKM yang efektif dan optimal meliputi peran pemerintah sebagai</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran kelurahan sebagai fasilitator, dapat terlihat melalui daya dukungnya terhadap sarana prasana dan kerjasama dengan pihak luar. Sebagai katalisator, Kelurahan Kebonsari merespon dengan cepat mengenai keluhan keluhan UMKM Kebonsari. Sebagai regulator, Kelurahan Kebonsari telah</p> |

| No | Penulisan/Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Judul                                                                                                                                                | Metode dan Teori                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | fasilitator, regulator dan katalisator                                                                                                                                                                                                                                                       | mengimplementasikan peraturan atau kebijakan terkait pemberdayaan UMKM yang sudah ada untuk menjamin ke pastian hukum pelaksanaan pemberdayaan dan meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam menghadapi persaingan usaha.                                                                                                                                                                                          |
| 8. | Maros, H., & Juniar, S. (2016).<br><br>Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, 1–23. | Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. | <b>Metode:</b> Deskriptif Kualitatif<br><b>Teori:</b> Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam Pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kabupaten Tolitoli yang menggunakan teori Gede Diva (2009:15) yang menyatakan terdapat tiga peran Pemerintahan yaitu sebagai : | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas koperasi dan UMKM berperan dalam memperdayakan pelaku usaha mikro di Tolitoli. Dalam artian semuanya dilakukan seperti memberi pelatihan-pelatihan, kebijakan yang mempermudah pelaku usaha serta pemberian bantuan berupa alat dan modal kepada pelaku usaha mikro, walaupun masih adanya hambatan berupa terbatasnya bantuan permodalan yang diberikan oleh pemerintah |

| No | Penulisan/Tahun                 | Judul                                                               | Metode dan Teori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 |                                                                     | Fasilitator, Regulator, Katalisator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | daerah dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tolitoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9. | Fiona Suwana a, dan Lily (2017) | Empowering Indonesian Women Through Digital Building Media Literacy | <p><b>Metode:</b> Kualitatif</p> <p><b>Teori:</b> Widyastuti (2014) mengutip Herawati mengemukakan tiga aspek vital untuk pemberdayaan. Pertama, akses bermakna berkaitan dengan akses informasi digital dan kemampuan masing-masing individu untuk menggunakan teknologi untuk meningkatkan kehidupan sosial. Kedua, motivasi tidak berhubungan dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi tetapi juga untuk apa yang dilakukan dengan menggunakan teknologi</p> | Hasil penelitian ini menunjukkan Masih ada kesenjangan digital gender di Indonesia. Perempuan Indonesia membutuhkan media digital keterampilan literasi untuk menggunakan Internet secara efektif dan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Memberdayakan kemampuan literasi meliputi keterampilan menggunakan media digital untuk mengakses, mencari, menganalisis, merefleksi, berbagi, dan berkreasi. |

| No  | Penulisan/Tahun                                   | Judul                                                                                              | Metode dan Teori                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                   |                                                                                                    | ini. Ketiga, Pemberdayaan melibatkan kapasitas sosial individu Untuk aktif dan percaya diri menggunakan media digital.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Sarjiyanto, Sarwoto, dan Teuku Surya Darma (2022) | The Sustainability of Community Empowerment as Development Strategies: The Experience of Indonesia | <b>Metode:</b> Kualitatif<br><b>Teori:</b> Dasar teori yang digunakan yaitu dengan menggunakan teori dari Menurut Gede Diva (2009:15- 18) yang mengemukakan terdapat tiga peran pemerintah dalam pengembangan UMKM yang efektif dan optimal meliputi peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. | Hasil penelitian ini menunjukkan Pembangunan di Indonesia saat ini berada dalam paradigma baru dengan kebangkitan desentralisasi dan demokrasi lokal karena terbentuknya UU Desa. Namun, desentralisasi dan demokrasi lokal adalah solusi yang paling manusiawi dan tepat untuk tata kelola dan pembangunan. Mereka secara normatif mendorong tumbuhnya kemandirian masyarakat lokal, menciptakan potensi dan inovasi, membawa masyarakat layanan lebih dekat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas |

| No | Penulisan/Tahun | Judul | Metode dan Teori | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |       |                  | pemerintah daerah dan memperkuat aktif partisipasi masyarakat dalam setiap agenda pembangunan. Menurut Mustopadidjaja AR (2002), the penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari paradigma, sistem, dan politik proses. Oleh karena itu, ini adalah model pembangunan yang mengintegrasikan paradigma. |

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, lokasi penelitian merupakan hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dapat dilihat pada tabel di atas. Penelitian ini dilakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif, penulis meneliti peran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam memaksimalkan pemberdayaan kelompok masyarakat di bidang sosial.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori utama, yaitu Administrasi Publik, Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, dan Peran Pemerintah Daerah. Fokus utama dari penelitian ini adalah teori mengenai Peran Pemerintah Daerah, khususnya peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## **1.7 Kerangka Teori**

### **1.7.1 Administrasi Publik**

Secara etimologis, kata "administrasi" berasal dari Bahasa Inggris *administration*, yang bentuk infinitifnya adalah *to administer*, dengan arti *to manage* (mengelola). Dalam Bahasa Belanda, istilah "administratie" memiliki cakupan makna yang mencakup tata usaha, pengelolaan kegiatan organisasi, serta manajemen sumber daya. Dari pengertian tersebut, administrasi dapat didefinisikan dalam dua arti, yaitu arti sempit dan arti luas.

Dalam arti sempit, administrasi sering diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan, yang pada dasarnya merupakan pekerjaan mengendalikan informasi. Tata usaha juga mencakup berbagai kegiatan seperti menulis, mencatat,

menggandakan, dan menyimpan dokumen, yang sering disebut sebagai *clerical work* (Silalahi, 2010: 5). Dalam arti luas, administrasi diartikan sebagai kerjasama. Istilah ini merujuk pada kegiatan bersama yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama melibatkan rangkaian aktivitas yang dilakukan secara terorganisir dan terarah berdasarkan pembagian tugas yang telah disepakati bersama (Silalahi, 2010: 8).

Menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2014: 8), administrasi publik merupakan perpaduan yang rumit antara teori dan praktik, dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, administrasi publik bertujuan untuk meningkatkan kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Pandangan serupa disampaikan oleh Henry dalam Rahman (2017: 19), yang menyatakan bahwa administrasi publik adalah afiliasi antara teori dan praktik, bertujuan untuk mempublikasikan hubungan pemerintah dengan masyarakat, serta memperbaiki sensitivitas kebijakan publik dalam memenuhi kebutuhan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah bentuk kerjasama yang melibatkan individu atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah secara efektif dan efisien, guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

### 1.7.2 Paradigma Administrasi Publik

**Tabel 1.4 Paradigma Penelitian**

| <b>Paradigma Administrasi Publik</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paradigma 1                          | Fokus administrasi terbatas pada organisasi, tenaga kerja, dan penganggaran birokrasi, sedangkan pokok pikiran politiknya ialah perkara dalam pemerintahan, politik, dan kebijakan. Tokoh penting yang berpengaruh antara lain Frank J. Goodnow dan Leonardo D. White. Penekanannya terletak pada locus-nya yang berkaitan dengan di mana seharusnya administrasi publik berada. Paradigma pertama ini menghasilkan pemahaman yang lebih kuat tentang perbedaan antara dikotomi politik dan administrasi. Pokok pada pemikiran ini, yaitu seharusnya politik tidak perlu mengganggu administrasi, dan administrasi negara harus menjadi suatu ilmu pengetahuan yang bebas nilai. |
| Paradigma 2                          | Administrasi negara menjangkau puncak ketenarannya. Tahun 1930-an, administrasi telah menerima banyak kontribusi berharga dari industri dan pemerintah, sehingga prinsip inilah yang muncul akibat pengetahuan manajemen yang semakin berkembang. Prinsip tersebut, bahwa administrasi negara dapat terjadi pada semua tatanan administrasi tanpa memedulikan lingkungan, fungsi, kebudayaan, misi, atau kerangka institusi. Tokoh-tokoh penting dari paradigma kedua ialah Mary Parker Follet, Willoughby, Henry Fayol, Gulick dan Urwick, Frederick W. Taylor.                                                                                                                 |
| Paradigma 3                          | Dalam fase ini hubungan konseptual yang sebelumnya sudah ada antara ilmu politik dan administrasi ditetapkan kembali. Usaha yang ada dalam fase ini memiliki risiko yakni bidang yang dirumuskan harus berfokus pada keahlian yang esensial. Paradigma ini beranggapan bahwa studi administrasi negara memiliki perbedaan dari segi titik beratnya tetapi tetap bagian dari ilmu politik. Perkembangan baru dimasa ini, yakni timbul penggunaan studi kasus yang bersifat epistemologis (berkaitan dengan karakter, serta jenis pengetahuan), lalu timbul studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai satu bagian dari administrasi negara.                          |



| <b>Paradigma Administrasi Publik</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paradigma 3                          | Dalam fase ini hubungan konseptual yang sebelumnya sudah ada antara ilmu politik dan administrasi ditetapkan kembali. Usaha yang ada dalam fase ini memiliki risiko yakni bidang yang dirumuskan harus berfokus pada keahlian yang esensial. Paradigma ini beranggapan bahwa studi administrasi negara memiliki perbedaan dari segi titik beratnya tetapi tetap bagian dari ilmu politik. Perkembangan baru dimasa ini, yakni timbul penggunaan studi kasus yang bersifat epistemologis (berkaitan dengan karakter, serta jenis pengetahuan), lalu timbul studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai satu bagian dari administrasi negara.                                                                            |
| Paradigma 4                          | Pada tahap ini, administrasi publik hanya menyediakan fokus, bukan locus-nya. Menurut paradigma keempat ini, administrasi publik yang merupakan bagian dari ilmu politik perlu disempurnakan lebih jauh dalam aspek yang selaras, yakni mengekspansi administrasi yang sepenuhnya didasarkan pada psikologi sosial dan yang lainnya berkaitan dengan kompleksitas kebijakan publik. Istilah ilmu administratif digunakan paradigma ini untuk menampakkan isi dan arah suatu percakapan. Ilmu ini mencakup pembahasan teori organisasi dan ilmu manajemen. Teori organisasi memberikan kontribusi signifikan dalam karya para sarjana di bidang psikologi sosial, administrasi perusahaan, dan sosiologi.                           |
| Paradigma 5                          | Paradigma fase kelima adalah paradigma yang sudah dikembangkan dari paradigma sebelumnya. Ilmu administrasi negara adalah ilmu yang berhubungan dengan ilmu lainnya, jadi tidak terbatas hanya pada satu kebijakan. Administrasi negara berfokus pada berbagai teori yang mencakup analisis kebijakan publik. Manajemen modern, teknik administrasi, organisasi, persoalan aspirasi masyarakat, dan persoalan yang berhubungan dengan birokrasi pemerintahan. Sifat dari administrasi negara adalah kompleks yang di dalamnya mencakup penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diartikan luas. Hal tersebut dianggap sebagai hal yang mengaitkan antara focus administrasi negara dengan locus-nya. |
| Paradigma 6                          | Fokusnya adalah upaya untuk menyusun dan mendesain organisasi dengan memperhatikan nilai kemanusiaan. Ikeanyibe (2017: 6) menyatakan bahwa penyedia layanan bertugas menggerakkan, sementara pemerintah mengatur dan mengoordinasi. Gibson dalam Ikeanyibe (2017: 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Paradigma Administrasi Publik |                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | menambahkan bahwa governance melibatkan kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam menjalankan fungsi pemerintahan. |

### 1.7.3 Manajemen Publik

Manajemen publik, menurut Hughes dalam Sudarmanto dkk. (2020:1), adalah keterlibatan organisasi dalam mencapai tujuan dengan efisiensi maksimum serta bertanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal. Fokus manajemen publik, sebagaimana dipaparkan oleh Wijaya dan Danar (2014:2), terletak pada pengendalian cara kerja organisasi sektor publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, manajemen publik juga berperan dalam mengatur dan mengarahkan sektor publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga tercipta kepuasan masyarakat (Sudarmanto et al., 2020:2).

Menurut Ott, Hyde, dan Shafritz dalam Wijaya dan Danar (2014:1), manajemen publik adalah cabang administrasi publik yang secara khusus membahas keilmuan terkait desain program, restrukturisasi organisasi, alokasi sumber daya melalui sistem penganggaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, serta evaluasi dan audit program. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Shafritz dan Russel dalam Sudarmanto dkk. (2020:70), yang mendefinisikan manajemen publik sebagai pemanfaatan sumber daya untuk mengelola organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen publik adalah upaya membentuk sistem manajemen yang mencakup fungsi perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

#### 1.7.4 Peran Pemerintah

Menurut Rasyid (dalam Labolo, 2014:34), terdapat empat fungsi pemerintahan, yaitu:

1. Pelayanan (*Public Service*)
2. Pembangunan (*Development*)
3. Pemberdayaan (*Empowering*)
4. Pengaturan (*Regulation*)

Sementara itu, Arif (dalam Nurdin, 2014:69-70) menyebutkan beberapa peran pemerintah, yaitu:

1. **Regulator:** Sebagai regulator, pemerintah menetapkan arah pembangunan dengan menyusun peraturan guna menciptakan efektivitas dan ketertiban administrasi pembangunan. Peran ini memberikan acuan dasar yang dapat diinterpretasikan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur pelaksanaan pemberdayaan.
2. **Dinamisator:** Sebagai dinamisator, pemerintah mendorong partisipasi berbagai pihak ketika terjadi stagnasi dalam proses pembangunan. Peran ini bertujuan untuk memelihara dinamika pembangunan daerah.
3. **Fasilitator:** Dalam perannya sebagai fasilitator, pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan, termasuk menjembatani kepentingan berbagai pihak guna mengoptimalkan

pembangunan daerah. Peran ini berfokus pada terciptanya suasana yang tertib, nyaman, dan aman.

4. **Katalisator:** Sebagai katalisator, pemerintah berfungsi mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara, sehingga potensi tersebut dapat menjadi modal sosial yang mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah mencakup pembuat peraturan, pemberdayaan, pelayanan, fasilitasi sarana dan prasarana, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **1.7.5 Pemberdayaan Sosial**

Pemberdayaan sosial, menurut Suharto (2017:59), adalah sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan memperkuat kelompok lemah di masyarakat, termasuk individu yang menghadapi berbagai masalah. Sebagai tujuan, pemberdayaan mengacu pada kondisi yang diharapkan dari perubahan sosial yang terjadi, yaitu masyarakat yang berdaya. Pengertian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan sebagai proses diukur dari tercapainya pemberdayaan sebagai tujuan.

Selain itu Menurut Adhi (Sari, 2020:2) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah program dan proses. Sebagai program, pemberdayaan mencakup kegiatan yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan tertentu dalam jangka waktu tertentu, seperti 1, 3, atau 6 tahun, bahkan lebih. Sebagai proses, pemberdayaan tidak berhenti pada titik waktu tertentu tetapi berkesinambungan untuk terus meningkatkan daya guna individu maupun organisasi.

Sari (2020:2-3) turut menyatakan bahwa ketika pemberdayaan sebagai program dan proses digabungkan, fasilitator, baik dari lembaga swadaya masyarakat maupun pemerintah, memiliki peran penting dalam membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup mereka. Bahkan setelah program berakhir, masyarakat diharapkan tetap mampu berdiskusi dan menyelesaikan masalah lain secara mandiri. Dengan demikian, pemberdayaan sosial dapat dipahami sebagai program yang memiliki tahapan dan proses berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kemampuan individu atau organisasi untuk mencapai daya guna yang lebih optimal.

#### **1.7.6 Strategi Pemberdayaan Sosial**

Strategi pemberdayaan sosial diarahkan kepada individu meskipun implementasinya sering kali terkait dengan kegiatan kelompok. Suharto (2017:66-67) mengidentifikasi tiga tingkat atau matra pemberdayaan dalam konteks pekerjaan sosial, yaitu mikro, mezzo, dan makro.

- a. Pada tingkat mikro, pemberdayaan berfokus pada individu, misalnya melalui pembinaan atau bimbingan konseling, yang bertujuan untuk membantu individu menjalani kehidupan sehari-hari. Strategi ini dikenal sebagai pendekatan sistem kecil yang berorientasi pada tugas-tugas individu.
- b. Pada tingkat mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok atau komunitas tertentu. Proses ini melibatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan wawasan, kreativitas, dan perilaku kelompok sehingga mereka mampu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

- c. Pada tingkat makro, pemberdayaan diarahkan pada lingkungan yang lebih luas, seperti melalui perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan sosial, manajemen konflik, dan kegiatan sosial lainnya. Strategi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai kondisi lingkungan mereka sehingga dapat menentukan alternatif kegiatan yang mendukung pemberdayaan secara menyeluruh.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan terdapat 3 strategi. Pertama, pemberdayaan dilakukan dalam konteks individu seperti melakukan bimbingan konseling dan lainnya. Kemudian strategi yang kedua yakni pemberdayaan terhadap sekelompok orang atau organisasi, contohnya peningkatan kapasitas kelembagaan. Kemudian strategi yang terakhir yakni pemberdayaan yang dilakukan dalam konteks yang lebih luas, seperti perencanaan sosial, perumusan kebijakan dan lainnya.

#### **1.7.7 Proses Pemberdayaan Sosial**

Proses pemberdayaan merupakan rangkaian tahapan yang harus dilalui dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Menurut Adhi (2012:35), tahapan tersebut mencakup persiapan, pengkajian, perencanaan, formulasi rencana aksi, implementasi, evaluasi, dan terminasi.

- 1) Tahap persiapan (*engagement*). Merupakan tahapan persiapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi beberapa hal, yakni persiapan pelaksana kegiatan dan di lapangan.

- 2) Tahap pengkajian (*assessment*). Proses ini dilaksanakan dengan mengidentifikasi masalah yang diekspresikan serta sumber daya yang dimiliki kelompok sasaran.
- 3) Tahap perencanaan alternatif kegiatan (*planning*). Tahap ini dilaksanakan dengan menentukan alternatif perencanaan kegiatan oleh pelaksana kegiatan serta melibatkan anggota sasaran pemberdayaan.
- 4) Tahap formulasi rencana aksi (*action plan formulation*). Tahapan ini, dimana pelaksana kegiatan membantu merumuskan kegiatan atau program apa yang akan dipilih setelah sebelumnya terdapat beberapa alternatif program/kegiatan.
- 5) Tahap implementasi kegiatan (*implementation*). Tahap implementasi sangat penting, dimana setelah adanya perencanaan dan persiapan yang matang kegiatan harus diimplementasikan di lapangan.
- 6) Tahap evaluasi (*evaluation*). Tahap ini disebut sebagai pengkajian ulang terhadap hasil yang telah dilaksanakan apakah berhasil ataukah masih belum optimal.
- 7) Tahap terminasi (*termination*). Merupakan tahap berakhirnya ikatan antara pelaksana pemberdayaan dan sasaran pemberdayaan karena hasil kegiatan diharapkan dapat menjadikan kelompok sasaran mampu mandiri.

Dapat disimpulkan dari pendapat diatas mengenai proses pemberdayaan dilakukan melalui beberapa tahap yakni dimulai dari input, proses, kemudian output. Oleh karena itu untuk melewati tahap pemberdayaan dimulai dari tahap persiapan, seperti perumusan kebijakan, perencanaan program dan lainnya.

Kemudian proses, dimana pemberdayaan ini dilaksanakan atau di implementasikan. Tahap akhir yakni output dari proses pemberdayaan tersebut apakah pemberdayaan itu membawa hal positif atau bahkan masih gagal.

#### **1.7.8 Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan**

Pengertian organisasi menurut Sondang P. Siagian (dikutip dalam Sari & Eliana, 2006) adalah “bentuk persekutuan dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita serta terikat secara formal dalam suatu ikatan hierarki, yang di dalamnya terdapat hubungan antaranggota, termasuk pemimpin dan staf atau anggota.” Lebih lanjut, Stephen Robbins (dikutip dalam Sari & Eliana, 2006) menambahkan bahwa “organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan kepemimpinan yang teridentifikasi, bekerja secara teratur untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan sekelompok orang.” Dari definisi tersebut, organisasi dapat disimpulkan sebagai sekelompok individu yang memiliki hubungan dan cita-cita bersama di bawah suatu naungan, bekerja untuk mencapai tujuan bersama.

#### **1.7.9 Pengertian Kemasyarakatan**

Kemasyarakatan berasal dari kata "masyarakat." Menurut Soekanto (2018:22), “masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam satu kesatuan yang bercampur untuk waktu yang lama, membentuk sistem kehidupan bersama, serta menciptakan kebudayaan karena adanya rasa keterikatan antaranggota kelompok.” Sementara itu, Maciver dan Page (dikutip dalam Soekanto, 2018:21) menjelaskan bahwa “masyarakat adalah sistem yang terdiri dari



kebiasaan, tata cara, wewenang, kerja sama, pengawasan tingkah laku, dan kebebasan manusia. Sistem dinamis ini merupakan jalinan hubungan sosial yang terus berubah.” Dengan demikian, kemasyarakatan dapat disimpulkan sebagai proses terbentuknya satu kesatuan sistem kehidupan bersama yang berlangsung cukup lama. Dalam masyarakat, terdapat keterkaitan individu karena adanya kebiasaan, budaya, tata cara, wewenang, dan kerja sama yang sama.

#### **1.7.10 Pengertian Organisasi Kemasyarakatan**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, merupakan: Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

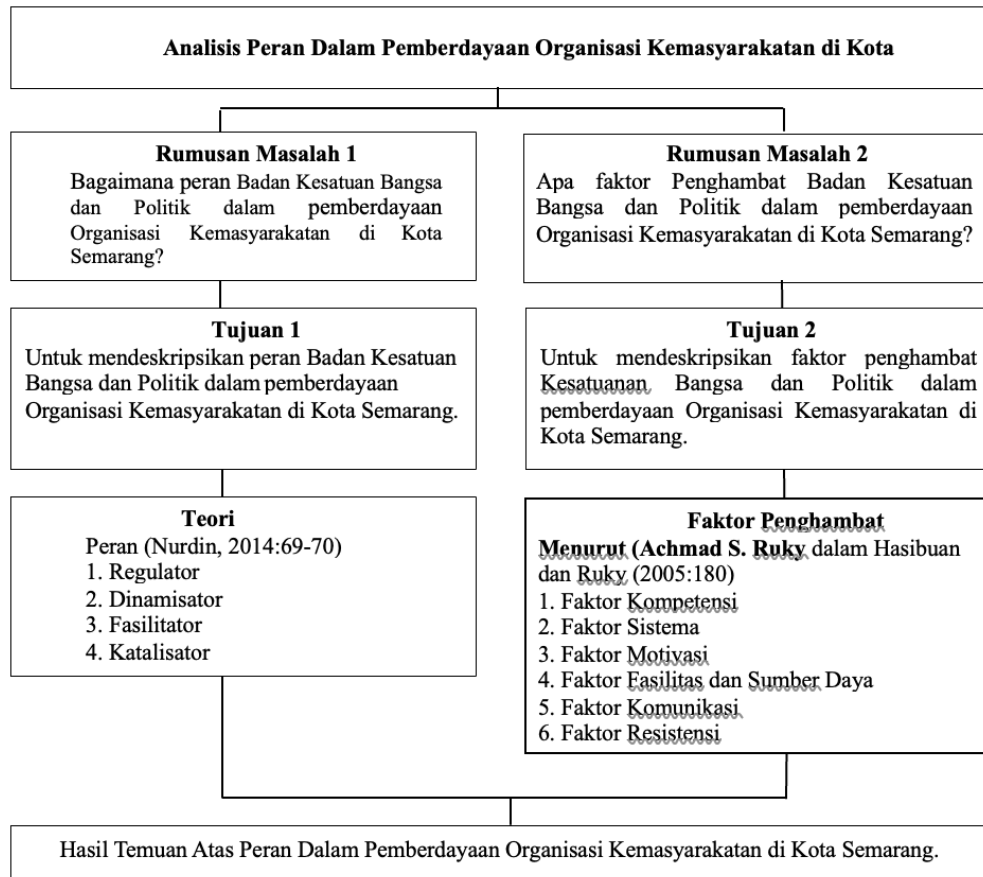
Menurut Satria (2019: 189) berpendapat bahwa Organisasi kemasyarakatan dibentuk atas dasar kepentingan, misalnya kepentingan sosial, contohnya komunitas peduli lingkungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan atau yang disingkat dengan Ormas adalah suatu kesatuan masyarakat dalam ikatan yang berdasarkan kesamaan bentuk, cita-cita, serta tujuan, dimana tujuan utamanya adalah ikut berpartisipasi dalam membangun tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **1.7.11 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki struktur yang berbeda. Di tingkat provinsi, perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas daerah, dan perangkat daerah lainnya. Sementara itu, perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan. Pembentukan badan daerah di tingkat kabupaten/kota ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

## 1.8 Kerangka Pemikiran

**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**



## 1.9 Operasional Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan elemen penting dalam penelitian. Elemen ini menjabarkan interpretasi dari indikator-indikator yang telah ditentukan oleh peneliti. Penjabaran tersebut bertujuan memberikan panduan yang jelas untuk menjawab tujuan penelitian secara sistematis dan terarah.

### 1.9.1 Peran Pemerintah

#### A. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Sebagai regulator atau pembuat peraturan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan dapat mendata keberadaan ormas yang ada. Peran pemerintah sebagai regulator dilihat dari gejala penelitian antara lain:

1. Adanya ketentuan mengenai aturan bagaimana melakukan registrasi ulang atau mendaftarkan keberadaan ormas di Kota Semarang yang sesuai dengan peraturan-peraturan sehingga lebih memudahkan.
2. Penyusunan bahan kebijakan yang terstruktur dan memperhatikan kondisi organisasi kemasyarakatan.

#### **B. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator**

Sebagai dinamisator, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat menggerakkan partisipasi dari organisasi masyarakat. Komponen ini akan dilihat menggunakan gejala sebagai berikut:

1. Adanya perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang rutin dilakukan untuk memperkuat hubungan atau harmonisasi antara pemerintah dengan ormas.
2. Adanya sinergitas antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam bidang sosial.

#### **C. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator**

Sebagai fasilitator atau menjembatani antara pemerintah dan organisasi masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan

lebih intensif dalam pemberian informasi. Komponen ini akan dilihat menggunakan gejala sebagai berikut:

1. Adanya komunikasi yang baik mengenai informasi yang diberikan pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan, seperti sosialisasi yang segera disampaikan dengan tepat serta jelas sehingga mudah dipahami oleh organisasi kemasyarakatan. Untuk hal itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang diharapkan memiliki sarana dan prasarana yang mempercepat penerimaan informasi.
2. Adanya pemberian bantuan tunai dan non-tunai yang dapat meningkatkan mutu organisasi ormas.

#### **D. Peran Pemerintah sebagai Katalisator**

Sebagai katalisator atau pendorong (agen) dalam meningkatkan partisipasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan memiliki inovasi untuk melaksanakan proses pemberdayaan. Oleh karena itu, harus didukung oleh kemampuan yang memadai dari aparaturnya.

**Tabel 1.5 Operasional Konsep Peran Pemerintah**

| <b>Fokus Penelitian</b>                                                              | <b>Gejala</b> | <b>Sub-Gejala</b>                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan | Regulator     | 1. Membuat Kebijakan<br>2. Monitoring Kebijakan         |
|                                                                                      | Fasilitator   | 1. Sarana Prasarana<br>2. Pendukung                     |
|                                                                                      | Dinimisor     | 1. Penggerak<br>2. Inovator                             |
|                                                                                      | Katalisator   | 1. Pengembangan Program<br>2. Upaya Mendorong Inisiatif |

### 1.10 Faktor Penghambat Kinerja Organisasi

Berdasarkan pandangan Achmad S. Ruky yang dikutip dalam Hasibuan dan Ruky (2005:180), terdapat enam faktor utama yang menghambat kinerja organisasi. Berikut adalah penjelasan singkat masing-masing faktor tersebut:

#### 1. Faktor Kompetensi

Kompetensi merujuk pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam organisasi. Kinerja organisasi akan terhambat jika anggota organisasi tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif. Kekurangan dalam pelatihan, pendidikan, atau pengalaman dapat menyebabkan penurunan kualitas kerja dan produktivitas.

#### 2. Faktor Sistem

Sistem yang dimaksud adalah prosedur, aturan, dan kebijakan yang mengatur operasional organisasi. Sistem yang tidak efisien, tidak jelas, atau terlalu birokratis dapat menjadi penghambat kinerja karena mengakibatkan kebingungan, keterlambatan, dan inefisiensi dalam pelaksanaan tugas. Sistem yang usang atau tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini juga dapat menghambat adaptasi dan inovasi.

#### 3. Faktor Motivasi

Motivasi merupakan dorongan internal yang mempengaruhi keinginan individu untuk mencapai tujuan tertentu. Kinerja organisasi dapat terhambat jika karyawan tidak termotivasi dengan baik, baik karena kurangnya insentif, lingkungan kerja yang tidak mendukung, atau tidak adanya pengakuan

atas pencapaian. Motivasi yang rendah sering kali berujung pada produktivitas yang rendah dan peningkatan turnover.

#### 4. Faktor Fasilitas dan Sumber Daya

Fasilitas dan sumber daya mencakup semua alat, teknologi, dana, dan infrastruktur yang mendukung operasional organisasi. Kinerja organisasi akan terganggu jika fasilitas dan sumber daya yang tersedia tidak memadai atau tidak mendukung kebutuhan operasional. Ketiadaan atau keterbatasan sumber daya dapat membatasi kemampuan organisasi untuk menjalankan fungsi-fungsi penting secara efisien.

#### 5. Faktor Komunikasi

Komunikasi yang efektif adalah kunci koordinasi dan kolaborasi dalam organisasi. Hambatan dalam komunikasi, seperti kurangnya saluran komunikasi yang efektif, miskomunikasi antardepartemen, atau informasi yang tidak tersampaikan dengan jelas, dapat menyebabkan ketidaksepahaman, konflik, dan keputusan yang salah, yang semuanya berdampak negatif pada kinerja organisasi.

#### 6. Faktor Resistensi

Resistensi terhadap perubahan merupakan salah satu hambatan utama dalam pengembangan dan inovasi organisasi. Resistensi dapat berasal dari individu atau kelompok yang merasa terancam oleh perubahan, entah itu karena ketidakpastian, kehilangan kekuasaan, atau kenyamanan dengan status quo.

**Tabel 1.6 Operasional Konsep Faktor Penghambat Kinerja Organisasi**

| <b>Fokus Penelitian</b> | <b>Gejala</b>             | <b>Sub-Gejala</b>                                                                                                          |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor Penghambat       | Kompetensi                | 1. Kemampuan<br>2. Upaya Bakesbangpol dalam meningkatkan kompetensi pengurus ormas                                         |
|                         | Sistem                    | 1. Prosedur<br>2. Langkah menyederhanakan                                                                                  |
|                         | Motivasi                  | 1. Partisipasi<br>2. Strategi                                                                                              |
|                         | Fasilitas dan Sumber Daya | 1. Keterbatasan<br>2. Solusi                                                                                               |
|                         | Komunikasi                | 1. Koordinasi<br>2. Langkah yang diambil untuk memperbaiki komunikasi antar ormas di Kota Semarang                         |
|                         | Resistensi                | 1. Peran Bakesbangpol dalam mengurangi faktor penghambat resistensi perubahan pada ormas di Kota Semarang<br>2. Pendekatan |

### 1.11 Argumen Penelitian

Peneliti merumuskan asumsi atau anggapan dasar yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan suatu proses atas hak dan kewajiban yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, berupaya menopang tugas Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan wewenang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.



2. Pemberdayaan merupakan suatu proses kegiatan dalam rangka peningkatan daya serta guna dari seseorang, lembaga, atau sistem dengan tujuan dapat menjalankan kehidupan dan memecahkan masalah sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain.
3. Organisasi kemasyarakatan merupakan suatu kelompok yang didirikan oleh masyarakat yang bergerak serta melakukan kegiatan dalam bidang tertentu, dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan Nasional.

Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di tingkat lokal. Bakesbangpol, sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kesatuan bangsa dan politik, memiliki peran strategis dalam membentuk regulasi, mengawasi, dan mendukung pengembangan ormas di Kota Semarang. Namun, meskipun peran ini diakui, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi Bakesbangpol, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas peraturan, serta resistensi dari ormas itu sendiri.

Penelitian ini berargumen bahwa efektivitas peran Bakesbangpol dalam pemberdayaan ormas sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan ormas, serta dalam membangun kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, faktor internal seperti kompetensi staf dan dukungan fasilitas juga memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan program pemberdayaan.

Melalui analisis peran Bakesbangpol ini, penelitian ini berusaha mengungkap sejauh mana Bakesbangpol berhasil dalam melaksanakan fungsinya, serta

mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan ormas di Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang praktis untuk Bakesbangpol dalam mengoptimalkan peran mereka dalam konteks ini.

## **1.12 Metode Penelitian**

### **1.12.1 Tipe Penelitian**

Permasalahan yang akan dikaji memiliki latar belakang sosial serta dinamis. Oleh sebab itu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif guna menetapkan cara mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dari proses penelitian. Menggunakan metode pendekatan kualitatif ini, peneliti bermaksud untuk mendapatkan gambaran (deskriptif) tentang Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Sosial Di Kota Semarang.

### **1.12.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian atau lokasi penelitian ialah satu tempat dimana peneliti menemukan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan. Situs penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

### **1.12.3 Subyek Penelitian**

Dalam Penelitian ini, peneliti menentukan subyek yang akan di wawancarai antara lain:

1. Agung Nurul Falaq Adi Wibowo, S.E, M.A.P (Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan)
2. Satriyo Utomo Kurniawan ( Staf Analalisis )
3. Aris Kusdarmanto, SH (Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan)
4. AM Juma'i (Kepala Forum Kominikasi ormas Semarang Bersatu)
5. Istighfaror Nukhin (Ormas Fatayat NU)
6. Lukman Hakim ( Ormas Hizbul Wathan)

#### **1.12.4 Jenis Data**

Wiratna Sujarweni (2014: 89-94) mengungkapkan bahwa data di dalam penelitian digolongkan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif secara sederhana dapat berupa kata atau kalimat yang dapat didefinisikan. Sedangkan data kuantitatif merupakan data dalam bentuk angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif, yaitu informasi yang bukan dalam bentuk angka, melainkan diperoleh melalui dokumen atau data secara lisan maupun tulisan dalam.

#### **1.12.5 Sumber Data**

Creswell, J. W. (2013) menyatakan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif adalah tempat di mana peneliti memperoleh informasi yang diperlukan untuk memahami fenomena yang sedang diteliti. Sumber data ini bisa berupa individu, kelompok, dokumen, atau bahan lain yang relevan dengan konteks penelitian. Dilihat dari berbagai sumber datanya, maka pengumpulan data terdiri dari sumber data primer serta sumber data sekunder, antara lain:

1. Sumber primer. Artinya pada pelaksanaan wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, Sub koordinasi organisasi kemasyarakatan, dan Organisasi kemasyarakatan.
2. Sumber sekunder, Data yang tidak secara langsung diberikan langsung kepada peneliti, Peneliti mencari referensi dari buku di perpustakaan, kemudian E-Book, jurnal, berita yang di dapat dari internet.

#### **1.12.6 Teknik Pengumpulan Data**

Sedangkan data dilihat dari berbagai cara atau teknik pengumpulannya terdapat beberapa teknik pengumpulan, seperti observasi (*observation*), wawancara, serta dokumentasi. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Observasi

Observasi menurut Nazir (2009, hal. 211) bisa dilakukan secara pengamatan langsung melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, serta peraba. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung khususnya dalam pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Selain itu dengan observasi tak berstruktur peneliti mencari tahu informasi permasalahan ormas melalui berita media elektronik.

2. Wawancara

Sanjata (2013: 263) menyatakan bahwa wawancara (*interview*) merupakan teknik penelitian yang dilakukan melalui dialog, baik secara langsung (*luring*) maupun melalui saluran media (*daring*) tertentu, antara pewawancara dan yang

diwawancara sebagai sumber data. Dalam penelitian ini, digunakan metode wawancara terstruktur, yang dilaksanakan dengan menyusun daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh informan terkait. Wawancara dalam konteks penelitian ini berlangsung dalam format tanya jawab, diarahkan kepada petugas kepolisian dan pihak-pihak terkait.

### 3. Dokumentasi

Sugiyono (2009: 329) menyatakan bahwa dokumen adalah catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam konteks teknik pengumpulan data, dokumen berfungsi sebagai pelengkap untuk mendukung penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

#### **1.12.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Kegiatan penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017:246-252) berikut ini tahapan- tahapannya:

1. Kondensasi Data Tahapan reduksi data, pada saat peneliti data yang sebelumnya diperoleh dengan jumlah yang banyak, seperti memilah hasil wawancara dengan narasumber, kemudian dirangkum, memilih hal yang utama, kemudian memfokuskan terhadap hal yang penting, serta mengesampingkan data yang tidak digunakan.
2. Penyajian Data Langkah selanjutnya yakni menyajikan data, data yang sebelumnya diperoleh dan di pilih berdasarkan data yang dibutuhkan, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi. Dengan disajikannya data hasil penelitian digunakan untuk mempermudah dalam memahami apakah Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Proses Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan sudah atau masih perlu melakukan peningkatan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi. Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan interpretasi singkat dari data yang telah diperoleh. Dalam proses ini, peneliti membandingkan hasil data dari para informan dengan permasalahan penelitian terkait peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di bidang sosial di Kota Semarang.

#### **1.12.8 Kualitas Data**

Pengujian keabsahan data terdiri dari berbagai cara, dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan data menurut Sugiyono (2017:270-277). Berikut proses pengujian keabsahan data dalam penelitian ini:

1. Uji Kredibilitas (Validitas Internal)

Uji kredibilitas data peneliti melakukan kecermatan dan ketekunan serta secara hati-hati dalam mengolah data yang sudah didapat dari penelitian, sehingga data yang diolah akurat dan sistematis tentang pengamatan yang dilakukan peneliti.

2. Uji Transferability (Validitas Eksternal)

Memudahkan orang lain dalam memahami hasil penelitian ini, dalam penyusunan laporannya, peneliti berusaha menguraikan sistematis, jelas, terperinci, dan jelas. Dengan demikian pembaca akan mudah memahami hasil dari

proses penelitian, sehingga penelitian yang sudah dilakukan dapat diimplementasikan di tempat lain atau tidak.

3. Uji Dependability (Reliabilitas)

Uji reliabilitas ini peneliti melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing untuk memeriksa keseluruhan aktivitas penelitian, mulai dari pengajuan judul, penyusunan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, serta pengolahan data penelitian, serta peneliti harus dapat menunjukkan bukti aktivitasnya.

4. Uji Confirmability (Obyektivitas)

Proses uji obyektivitas ini, peneliti, berusaha melakukan dokumentasi di setiap proses kegiatan penelitian, kemudian dengan adanya tanda tangan dari informan yang telah di wawancarai sebagai bukti telah melakukan penelitian. Oleh karena itu, data hasil penelitian yang telah disusun dapat dikatakan obyektif.